

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PILKADA TAHUN 2020 DI KOTA BALIKPAPAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Albert Hernando Santoso¹, Mulyana²

¹ Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri

E-mail: alberther26@gmail.com; mulyana@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini dilatar belakangi oleh jumlah partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan yang termasuk kategori belum optimal, karena dari total 443.243 orang yang masuk ke dalam daftar pemilih, hanya sebanyak 266.536 orang menggunakan hak pilihnya atau hanya 59%. . Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif, serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah bentuk partisipasi politik menurut Mas'ood dan Mac Andrew. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan, yaitu 1) Faktor politik, dimana masyarakat kecewa karena dibatasi oleh calon tunggal dan berasumsi terpilihnya Kepala Daerah tidak akan berdampak bagi mereka, Faktor Pandemi covid-18 yang memaksa masyarakat tidak hadir dalam pelaksanaan Pilkada, dan 3) Faktor Sosialisasi, kurangnya inovasi KPU Kota Balikpapan dalam kegiatan sosialisasi dimasa pandemi. Penulis menyarankan hendaknya pemerintah mengubah pola pikir dan menambah kepercayaan masyarakat untuk lebih aktif dalam berpartisipasi terutama dalam memilih. Memaksimalkan pendidikan politik dan kesadaran akan pentingnya kegiatan Pilkada. Pemerintah juga disarankan untuk berinovasi terutama dimasa pandemi ini dengan cara menambah program-program dalam melakukan sosialisasi Pilkada melalui media sosial/online dimasa yang akan datang.

Kata kunci; Partisipasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, PILKADA.

CITIZEN POLITICAL PARTICIPATION IN REGIONAL ELECTION 2020 IN BALIKPAPAN CITY EAST BORNEO PROVINCE

ABSTRACT. This research was motivated by the number of people's political participation in the 2020 Pilkada in Balikpapan City which was included in the not optimal category, because of a total of 443,243 people who entered the voter list, only 266,536 people exercised their right to vote. This study aims to describe and analyze the low level of public political participation and also the factors that influence the level of community political participation in the 2020 Pilkada in Balikpapan City. The method used in this study is a descriptive method with an inductive approach, and uses data collection techniques in the form of interviews and documentation. The theory used is a form of political participation according to Mas'ood and Mac Andrew. Based on the results of research and analysis that has been carried out by the author, there are several factors that influence the political participation of the community in the 2020 Pilkada in Balikpapan City, namely 1) Political factors, where people are disappointed because they are limited by a single candidate and assume the election of a Regional Head will not have an impact on them. , 2) The Covid-18 pandemic factor that forced the public not to attend the Pilkada, and 3) the Socialization Factor, the lack of innovation of the Balikpapan City KPU in socializing activities during the pandemic. The author suggests that the government should change the mindset and increase public confidence to be more active in participating, especially in voting. Maximizing political education and awareness of the importance of Pilkada activities. The government is also advised to innovate, especially during this pandemic by adding programs to socialize the elections through social media/online in the future.

Keywords; Political Participation, Regional Head Election, PILKADA.

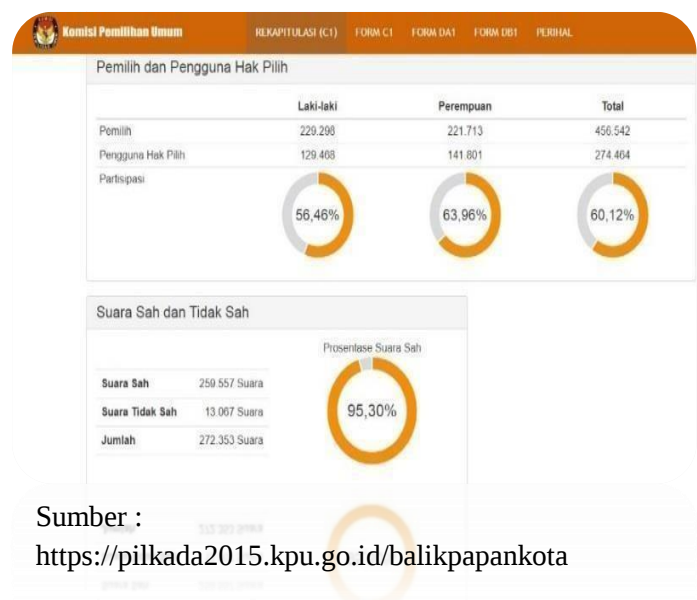
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah secara jelas menguraikan definisi dari Partai Politik. Adapun yang dimaksud dengan Partai Politik ialah organisasi yang sifatnya nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela, yang didasarkan atas adanya kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara dan memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ditingkat provinsi, pelaksanaan Pilkada ditujukan untuk memilih dan menentukan gubernur beserta wakil gubernur dan ditingkat kabupaten/kota Pilkada diselenggarakan untuk memilih bupati/walikota beserta dengan wakilnya. Ketentuan mengenai Pilkada sebelumnya diatur dan disusun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Adapun peraturan tersebut kemudian dicabut dan dibatalkan dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2014, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian peraturan tersebut juga diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai pedomannya.

Pelaksanaan Pilkada di daerah diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Lebih lanjut, terdapat masyarakat Pada Tahun 2020, Pilkada di Kota Balikpapan dilaksanakan untuk melakukan pemilihan walikota dan wakil walikota Kota Balikpapan. Namun di awal Tahun 2020 timbul wabah virus COVID-19 yang menyebabkan terjadinya situasi pandemi dan kasus wabah virus COVID-19 ini terjadi begitu pesat di Indonesia. Wabah virus COVID-19 telah menyebabkan banyak kebijakan, regulasi serta peraturan yang harus disusun oleh pemerintah untuk menangani situasi dan kondisi di Indonesia. Pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang tepat guna mengatasi situasi yang melanda seluruh aspek termasuk sosial, budaya, dan politik akibat wabah COVID-19. Social Distancing adalah

salah satu cara pengendalian dalam mengatasi wabah virus COVID-19. Karena adanya pandemi maka pelaksanaan Pilkada 2020 dilakukan dengan metode yang menerapkan aturan ketat tentang protokol kesehatan serta masyarakat dipaksa untuk dapat menerapkan social distancing. Hal ini menciptakan suasana yang berbeda dari Pilkada di tahun sebelumnya dan mengakibatkan tingkat partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilkada 2020 menurun serta rendahnya partisipasi warga untuk menyuarakan hak politik dalam memilih. Banyak sebagian warga yang lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah karena takut akan virus COVID-19 meskipun pelaksanaan Pilkada telah dilaksanakan sesuai dengan metode penegakkan aturan kesehatan, seperti salah satunya ialah *social distancing*.

Dilihat dari data Pilkada 2015 di Kota Balikpapan, jumlah partisipasi masyarakat jauh lebih tinggi dibandingkan Pilkada 2020 di Kota Balikpapan hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut. Berdasarkan data dari pelaksanaan Pemilihan yang dilakukan pada Pilkada Kota Balikpapan Tahun 2015 berikut persentase partisipasi masyarakat.



Sumber :

<https://pilkada2015.kpu.go.id/balikpapankota>

Gambar 1. Hasil Pilkada 2015

Berdasarkan data yang termuat dalam gambar diatas, diketahui angka jumlah dari persentase partisipasi politik masyarakat pada Pilkada 2015 Kota Balikpapan berjumlah 60,12%. Jumlah tersebut jauh dari target dan

tidak sesuai dengan sasaran yang sudah ditentukan oleh KPU Balikpapan, yang mana diharapkan partisipasi politik masyarakat bisa mencapai 75% partisipasi pemilih. Pelaksanaan Pilkada di Kota Balikpapan yang diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2020, pihak Komisi Pemilihan Umum telah memutuskan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang secara resmi ditetapkan pada saat rapat pleno. Selama proses rapat pleno berlangsung dari akumulasi seluruh informasi mengenai jumlah pemilih tersebut, akhirnya ditotal dan diputuskan terdapat 443.243 pemilih.

Lebih lanjut, telah ditetapkan sejumlah 1.505 TPS oleh KPU Kota Balikpapan, yang mana TPS tersebut akan disebar ke daerah di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan terdapat 1.669 RT dan sejumlah 1.501 TPS nantinya akan tersebar di dalamnya. Sedangkan sebanyak 4 (empat) TPS ditempatkan di Rumah Tahanan serta Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan. Pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Balikpapan terdapat pasangan calon walikota dan wakil walikota yaitu Rahmat Mas'ud – Thohari Aziz, kedua pasangan calon tersebut melawan kotak kosong. Berdasarkan dari jumlah DPT yang ditetapkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Balikpapan mendapatkan hasil rekapitulasi calon walikota dan wakil walikota, yakni memperlihatkan bahwa hanya 260.463 warga yang melaksanakan pencoblosan saat Pilkada, yang mana angka tersebut jauh dari total DPT yang mencapai 443.243 DPT, sehingga warga yang menjalankan hak partisipasi politiknya hanya 59%. Tingkat partisipasi warga dalam Pilkada tersebut sangat berbeda dengan harapan KPU Kota Balikpapan, yang sebelumnya menetapkan target partisipasi politik masyarakat mencapai 77%. Kejadian ini merupakan suatu permasalahan yang cukup serius sebab timbul sikap akan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di Kota Balikpapan.

Kajian terdahulu yang meneliti tentang partisipasi politik dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah cukup banyak dilakukan. Partisipasi Politik dalam pemilihan umum yang difokuskan pada pemilih pemula

dapat dilakukan melalui pemberian suara, berbicara terkait persoalan politik dan melakukan kegiatan kampanye (Wardhani, 2018). Istyawati (2021) menemukan bahwa dalam menentukan partisipasi politik bagi kaum Mahasiswa dapat dipengaruhi secara signifikan oleh penggunaan televisi dan surat kabar.

Sementara itu terdapat pengaruh dari Lembaga sosial dalam pemilihan umum, diantaranya tokoh agama, calon legislative dan kepala desa, disamping adanya rasionalitas masyarakat yang juga dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam penentuan partisipasi politik (Arniti, 2020). Hal senada ditemukan oleh penelitian lainnya, bahwa rasionalitas masyarakat turut menentukan partisipasi politik yang terjadi dalam pemilihan umum kepala daerah, disamping adanya pertimbangan ekonomi dan motivasi politik uang, serta visi misi dari calon kepala daerah (Subekti, 2014). Liando (2016) juga menyinggung terkait dengan dorongan motivasi terkait unsur kedekatan masyarakat secara emosional dengan calon yang akan dipilih, dan visi misi bukanlah ukuran yang menentukan partisipasi politik masyarakat.

Berbeda dengan Liando, Dunggio & Yantu (2021) menyatakan bahwa visi dan misi dari calon kepala daerah menjadi faktor penentu bagi masyarakat dalam berpartisipasi politik. Salah satu faktor pendorong partisipasi politik masyarakat adalah adanya kesadaran politik (Usfinit et al., 2014). Namun di sisi lain, diketahui bahwa dalam konteks kewarganegaraan, partisipasi politik masyarakat pada masa pandemik dapat dikatakan sangat baik (Nurgiansah, 2021). Oleh karena itu dalam kegiatan pemilihan umum, maka peran penting dari KPU dalam menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi penting untuk dilakukan (Putri, 2016).

Merujuk pada permasalahan dan berbagai penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti dapat menyatakan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun memiliki persamaan terkait fokus penelitian yaitu terkait dengan

partisipasi politik dalam pilkada namun peneliti mengkaji dan melakukan analisis dengan mempedomani pendapat (Mas'ood & MacAndrews (2008) terkait partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: *Electrol activity*, *Lobbying Organizational*, *Contacting dan Violence*. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis rendahnya partisipasi politik masyarakat dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Tahun 2020 di Kota Balikpapan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan dalam situasi alamiah dan memiliki sifat penemuan. Peneliti dalam penelitian kualitatif sebagai instrumen kunci. Sehingga peneliti diharuskan memiliki bekal dari segi pengetahuan teoritis serta wawasan yang lebih luas. Tujuannya adalah agar peneliti mampu bertanya, melakukan konstruksi objek maupun melakukan analisis dengan lebih jelas terhadap objek penelitian, dapat mengetahui adanya makna yang tersembunyi, memiliki pemahaman adanya interaksi sosial yang terjadi, mampu mengembangkan teori, dapat memberikan kepastian kebenaran data dan dapat memiliki mengenai sejarah perkembangan. (Noviawati & Masjidah, 2020). Dalam penelitian ini peneliti memilih informan yang menurut peneliti adalah orang-orang yang memiliki kompetensi dan informasi terkait permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pilkada 2020 di Kota Balikpapan.

Jumlah informan adalah 10 orang yang ditetapkan melalui teknik *purposive sampling* peneliti menetapkan sepuluh orang Informan penelitian, yaitu: terdiri dari Ketua Komisi Pemilihan Umum, Kepala Badan Pengawasan Pemilu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Badan Pengawasan Pemilu, Masyarakat Memilih dan

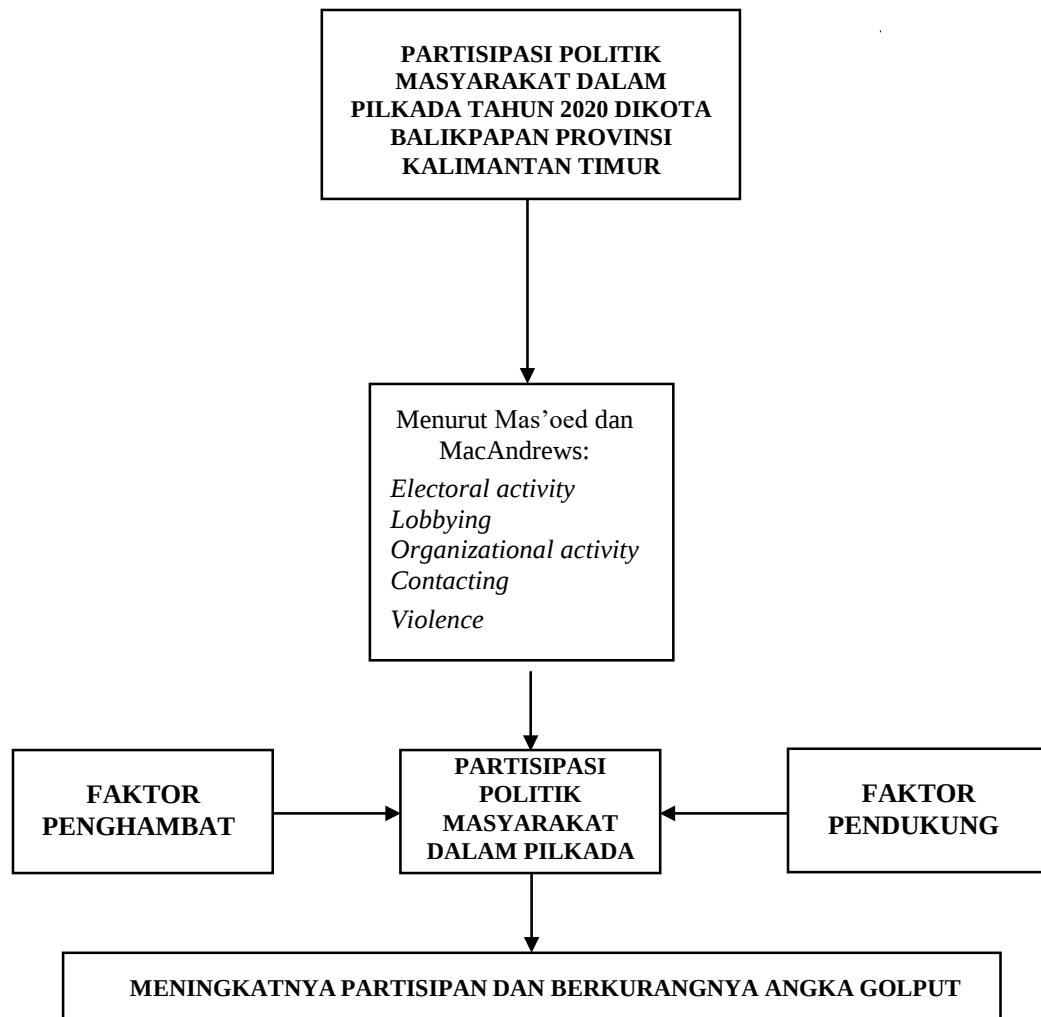
Masyarakat Tidak Memilih. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam kegiatan penelitian ini, penulis melakukan analisis Menurut Mas'ood dan MacAndrews (2008) partisipasi politik masyarakat secara umum dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu: 1) *Electrol activity*, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pemilihan; 2) *Lobbying*, yaitu tindakan dari seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhinya menyangkut masalah tertentu; 3) *Organizational activity*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam organisasi sosial dan politik, apakah ia sebagai pemimpin, aktivis, atau sebagai anggota biasa; 4) *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan secara individu maupun kelompok orang yang kecil jumlahnya; 5) *Violance*, yaitu dengan cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah, yaitu dengan cara kekerasan, pengacauan, dan pengrusakan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Partisipasi politik merupakan sebuah keterlibatan dari warga negara dalam keseluruhan tahapan kebijakan, mulai dari tahap proses pembuatan keputusan hingga pada tahap penilaian keputusan. Serta memiliki peluang untuk ikut terlibat dalam proses pelaksanaan keputusan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan proses pemilihan yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat atau penduduk daerah administratif setempat dengan ketentuan telah memenuhi persyaratan. Pilkada datau dikatakan sebagai pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dari Provinsi dan KPU yang ada di Kabupaten atau seta adanya pengawas yaitu Panitia Pengawasan Pemilihan Umum (Panwaslu) yang terdapat di Kabupaten atau Kota maupun yang ada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta diawasi oleh Panitia

Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota. Berdasarkan teori

partisipasi, maka penulis menggunakan teori tersebut sebagai landasan teori dalam kerangka berpikir yang ada.



Sumber: Olahan Peneliti, 2023
Gambar 2. Kerangka Pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Balikpapan

A. *Electoral Activity*

Selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 36 ayat (5), Pemilihan Umum merupakan salah satu parameter sosial politik, adat, dan tradisi, maka diselenggarakanlah Pilkada Serentak 2020 di Kota Balikpapan. Sebagai salah satu Kota yang berperan serta dalam kegiatan tersebut, masyarakat Kota Balikpapan dapat mewujudkannya sebagai indikator sosial

politik, terlebih dalam hal partisipasi politik. Penulis telah melangsungkan wawancara dengan Bapak Noor Thoha selaku Ketua KPU Kota Balikpapan pada tanggal 5 Januari 2022 di ruangannya yang menyatakan bahwa: "Secara umum kegiatan Pilkada Serentak Kota Balikpapan tahun 2020 memiliki partisipasi masyarakat cukup baik dan berjalan lancar dimasa pandemi Covid-19, walaupun hanya terdapat satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2018 dengan lawan kotak kosong". Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menunjukkan penurunan partisipasi masyarakat dalam memberikan hak suara mereka. Seperti yang dilansir dalam website

KPU Pilkada 2015, jumlah presentase pemilih pada Pilkada Serentak 2015 sebanyak 60,12 %. Sedangkan, pada Pilkada Serentak 2020 presentase pemilih sebanyak 59 %. Menurut data yang diperoleh dari KPU Kota Balikpapan, tingkat partisipasi masyarakat Kota Balikpapan masih sangat rendah, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Noor Thoha selaku Ketua KPU Kota Balikpapan pada tanggal 5 Januari 2022 di ruangannya mengatakan bahwa:

“Kota Balikpapan dimasa pandemi Covid-19 dengan partisipasi politik yang masih rendah, terutama dalam menggunakan hak pilih di Kota Balikpapan dalam kegiatan Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor terutama dampak yang disebabkan oleh Covid-19 yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi dalam kegiatan Pilkada 2020.”

Senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syabrani selaku Sekretaris KPU Kota Balikpapan yang di wawancara oleh penulis pada tanggal 6 Januari 2020 di ruangannya menyampaikan bahwa:

“Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Balikpapan, terutama pada kegiatan pemilihan. Bukan hanya karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

memilih calon kepala daerah, namun kecenderungan masyarakat yang tidak berpihak pada kubu calon tunggal.”

Banyaknya faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi politik masyarakat juga disampaikan oleh Kepala Bawaslu Kota Balikpapan saat wawancara dengan penulis pada tanggal 11 Januari 2022 di ruangannya yaitu:

“Banyaknya masyarakat yang berlawanan dengan kubu calon tunggal yaitu Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz menjadi penyebab utama rendahnya partisipasi politik masyarakat di Kota Balikpapan.”

Meskipun terdapat kolom kosong sebagai alternatif pilihan dari satu pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 di Kota Balikpapan, namun masyarakat tetap memilih untuk tidak hadir. Memperkuat hasil wawancara dengan para informan, diketahui bahwa jumlah TPS 1505 di Kota Balikpapan tersebar di masing-masing kelurahan yang berada di kecamatan Kota Balikpapan. Sedangkan pada saat pelaksanaan pemilihan terdapat perubahan angka yang mana terdapat pemilih yang pindah memilih dan yang menggunakan hak pilih menggunakan KTP elektronik atau Surat Keterangan, hal ini menyebabkan jumlah pemilih mengalami perubahan dan penambahan. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pilkada 2020 Kota Balikpapan

No.	Data Pemilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	221.589	221.654	443.243
2	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPh)	441	488	929
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	2.475	2.418	4.893
Jumlah Pemilih		224.505	224.560	449.065

Sumber: KPU Kota Balikpapan 2020

Perubahan yang terjadi bila dilihat berdasarkan tabel yang merupakan Rekapitulasi Jumlah Pemilih dari penambahan DPT, DPPH, dan

Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih melalui KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb).

Tabel 2. Rincian Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilihnya

No	Pengguna Hak Pilih	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	121.965	138.769	260.734
2	Jumlah Pemilih yang pindah memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	434	481	915
3	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb)	2.472	2.415	4.887
Jumlah Pemilih		124.871	141.665	266.536

Sumber: KPU Kota Balikpapan 2020

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Balikpapan 2020 terlaksana pada tanggal 9 Desember 2020. Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat rincian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat pelaksanaan pemilihan, sebelumnya telah di rekapitulasi jumlah pemilih yaitu 449.065 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 266.536 pada saat pelaksanaan pemilihan. Berdasarkan dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya didapatkan jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih. Terdapat 182.529 masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih namun tidak menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada 2020 Kota Balikpapan.

Syamsurya selaku salah satu masyarakat Kota Balikpapan yang dimana beliau berprofesi sebagai *driver* ojek *online* memberikan pendapatnya dalam wawancara penulis pada tanggal 13 Januari 2020 di

rumah penulis yaitu:

“Kehadiran saya di TPS tidak berpengaruh bagi pasangan calon tunggal Rahmad Mas’ud dan Thohari Aziz, beliau akan tetap terpilih karena tidak ada lawan. Terpilihnya beliau menjadi Walikota dan Wakil Walikota juga tidak akan merubah pekerjaan saya, lagi pula kalau saya datang akan mempengaruhi pendapatan saya sebagai *driver* ojek *online* apalagi dimasa pandemi ini yang sulit akan ekonomi dan pekerjaan”.

Kurangnya pemahaman masyarakat atas pentingnya partisipasi politik terutama dengan menggunakan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Balikpapan terlihat masih banyak, terutama dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan adanya Pembatasan kegiatan masyarakat membuat antusias untuk menyukkseskan Pilkada 2020 cukup rendah. Menurut Anisa selaku masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2020 sebagai pemilih mengatakan dalam wawancara bersama penulis yaitu:

“Pilkada saat ini terlalu memaksakan meskipun sudah ada protokol kesehatan, karena kalau dipikir corona sekarang ini buat kami masyarakat takut untuk keluar rumah dan melakukan kegiatan diluar , apalagi kalau berpergian sekarang wajib antigen atau PCR, terutama Pilkada itu menjelang hari libur, takutnya nanti saat libur natal — tahun baru gabisa mudik karena kena virus corona.”

Permasalahan akibat Pandemi Covid-19 dalam Pilkada 2020 Kota Balikpapan membuat pelaksanaan pemilihan dilaksanakan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berbeda dengan Pilkada sebelumnya, masyarakat diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak saat proses pemilihan. Hal tersebut dilakukan karena adanya aturan dari pemerintah yang mengharuskan masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang di atur.

Fahrozi selaku pemuda Kota Balikpapan menambahkan dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Januari 2020 dirumahnya, beliau menyatakan bahwa: “Covid-19 dan Pandemi ini membuat masyarakat malas untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan, selain dengan protokol yang harus ditaati, maraknya kasus Covid-19 yang ada membuat masyarakat takut dan khawatir karena terjaring virus Covid-19 yang dapat menular”. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kegiatan pemilihan di Kota Balikpapan memiliki partisipasi politik masyarakat yang masih rendah bukan hanya disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat, namun terdapat faktor lain seperti adanya Pandemi Covid-19 dan banyaknya masyarakat yang berlawanan dan tidak setuju dengan calon tunggal yaitu calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan.

B. Lobbying

Selaku Ketua KPU Kota Balikpapan, Bapak Noor Thoha yang di wawancara pada tanggal 5 Januari 2022 di ruangannya menyampaikan:

“Masyarakat Kota Balikpapan tergolong minoritas yang mendukung calon tunggal, namun berbanding balik dengan partai politik karena pasangan calon tunggal memiliki jumlah partai pendukung yang cukup banyak. Upaya lobby yang terjadi dari perwakilan masyarakat yang tidak mendukung pasangan calon terhadap pemegang kekuasaan terutama pejabat dari partai politik agar tidak memihak kepada calon tunggal dalam Pilkada Serentak 2020 kemarin.”

Iwan selaku pemuda Kota Balikpapan menambahkan dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Januari 2020 dirumahnya, beliau menyatakan bahwa:

“Asumsi warga yang tidak peduli terhadap Pilkada Serentak 2020 sangat mendominasi. Hal tersebut juga dilatar belakangi pada faktor partai politik yang belum mengoptimalkan fungsinya selaku badan yang mengupayakan kepentingan masyarakat. Terjadinya calon tunggal melawan kotak kosong merupakan cerminan tidak berhasilnya partai politik dalam menyiapkan calon yang memiliki kompetensi terbaik untuk dicalonkan sebagai Kepala Daerah Kota Balikpapan.”

Langkah-langkah dalam menjalankan *Lobby* yang dilakukan oleh kubu lawan dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan pemilihan pada Pilkada Serentak 2020 dengan menghubungi pejabat partai politik di Kota Balikpapan agar tidak memihak pada calon tunggal tersebut. Hal tersebut dilakukan agar calon tunggal tersebut mendapat suara lebih rendah dari kotak kosong.

C. Organizational activity

Kegiatan organisasi selama menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sangat gencar dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan. Noor Thoha selaku Ketua KPU Kota Balikpapan saat wawancara dengan penulis pada tanggal 5 Januari 2022 di ruangannya menyebutkan bahwa:

“Kami memaksimalkan kegiatan sosialisasi karena pada Pilkada Serentak 2020 memiliki banyak

tantangan karena dilaksanakan dimasa Pandemi Covid-19 dan adanya calon tunggal yang melawan kotak kosong di Kota Balikpapan. Meskipun adanya keterbatasan akibat aturan aturan yang ada, Sosialisasi tetap dilaksanakan dari seluruh elemen masyarakat mulai dari pemilih pemula, usia pekerja, bahkan sampai usia manula agar paham terhadap Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Pilkada.”

Sosialisasi pemilihan yang digencarkan oleh pihak KPU Kota Balikpapan bukan hanya pada saat kegiatan pencoblosan, tetapi juga padatahapan lainnya. Seperti yang telah dimuat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 ayat ke-10 bahwa sosialisasi penyelenggaraan pemilihan yang selanjutnya disebut sosialisasi pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

Kegiatan sosialisasi di Kota Balikpapan sudah sangat maksimal pelaksanaannya, hal ini disampaikan oleh Kepala Bawaslu Kota Balikpapan yang di wawancara oleh penulis pada tanggal 11 Januari 2022 di ruangannya yaitu:

“Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kota Balikpapan sangat maksimal, karena sosialisasi dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan, namun sayangnya antusiasme dari masyarakat Kota Balikpapan belum sejalan dalam mengikuti proses sosialisasi, dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 ini. Selain itu pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial ataupun *daring*.”

Selain itu selaku Sekretaris KPU Kota Balikpapan, Bapak Drs. Syabrani yang di wawancara oleh penulis pada tanggal 6 Januari 2022 di ruangannya yaitu:

“Masyarakat kurang tertarik dan tidak antusias dalam pelaksanaan sosialisasi Pilkada 2020. Padahal, KPU Kota

Balikpapan melaksanakan kegiatan sosialisasi di Kota Balikpapan dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menampilkan bagaimana proses tahapan pemberian suara pada calon tunggal dengan lawan kotak kosong. Selain itu berbagai informasi disampaikan melalui media sosial terkait pelaksanaan Pilkada 2020 akibat adanya Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat.”

Ditambahkan oleh Ketua KPU Kota Balikpapan saat di wawancara oleh penulis di ruangannya pada tanggal 5 Januari 2022 yaitu:

“Sasaran yang paling utama dalam sosialisasi dilakukan bagi pemilih pemula, karena banyaknya jumlah pemilih pemula di Kota Balikpapan yang tentu mempengaruhi jumlah pemberian suara. KPU Kota Balikpapan kesulitan untuk mendatangi langsung sekolah-sekolah yang berlokasi di Kota Balikpapan dan menerangkan bagaimana teknis pemberian suara pada Pilkada Serentak 2020 akibat adanya pandemi yang mengharuskan siswa-siswi melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini merupakan tantangan besar bagi KPU untuk mengupayakan bagi pemilih pemula agar mendapatkan informasi dalam pelaksanaan pemilihan pada saat Pilkada 2020 Kota Balikpapan.”

Kampanye positif dilakukan secara intensif oleh KPU Kota Balikpapan karena mengingat hanya ada calon tunggal yang mendaftar dalam Pilkada Serentak 2020 sehingga mengantisipasi masyarakat kurang informasi, sampai bersikap apatis dan tetap datang ke TPS dan tidak memberikan suara, baik untuk calon tunggal maupun suara untuk kotak kosong meskipun dimasa pandemi Covid-19. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU dianggap kurang diminati, berdasarkan wawancara penulis bersama Rustam selaku masyarakat yaitu:

Sosialisasi ataupun penyuluhan yang dilakukan oleh panitia sangat kurang menarik, dan dianggap tidak penting. Masyarakat memilih diam di rumah atau menghindari kerumunan karena Covid-19 yang kian meresahkan.

Lebih baik langsung datang ke TPS dan langsung mencoblos, tidak perlu ikut penyuluhan yang bisa menyebabkan terjaring covid akibat berkerumun.

Pada kenyataannya, seluruh program sosialisasi dalam menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2020 yang telah digencarkan oleh KPU Kota Balikpapan belum berjalan optimal, sosialisasi cukup sulit dilakukan karena adanya *social distancing*, protokol kesehatan dan menyebabkan rendahnya antusiasme masyarakat.

D. *Contacting*

Didapati usaha individu dalam mempengaruhi hasil pemilihan yang dikemukakan oleh Ketua KPU Kota Balikpapan, Bapak Noor Thoha yang di wawancara oleh penulis pada tanggal 5 Januari 2022 di ruangnya yaitu: “Guna meningkatkan dukungan pada kotak kosong, kubu yang bersebrangan dengan calon tunggal didapati menghubungi dan memberikan opini mengenai dampak memilih calon tunggal terhadap pejabat terkait dan tokoh-tokoh penting di Kota Balikpapan”. Individu-individu yang menjadi oknum tentu memiliki kepentingan politik baik pribadi maupun golongan akan menggunakan berbagai cara dalam mempengaruhi hasil akhir rekapitulasi suara dalam Pilkada 2020. Pelaksanaan komunikasi yang dilakukan masyarakat untuk membangun kerjasama dalam pelaksanaan Pilkada berjalan kurang baik, dikarenakan kurangnya antusias masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada yang hanya memiliki calon tunggal. Fahrozi selaku pemuda Kota Balikpapan menambahkan dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 13 Januari 2020, beliau menyatakan bahwa:

“Komunikasi yang dilakukan masyarakat untuk melaksanakan kerjasama dalam Pilkada berjalan kurang baik, masyarakat cenderung acuh dan tidak peduli terkait pemilihan karena mereka fokus menghadapi Pandemi Covid-19 yang lebih penting, sehingga kesadaran akan

pentingnya partisipasi politik masyarakat kurang.”

E. *Violance*

Demonstrasi pada saat kegiatan menjelang Pilkada 2020 Kota Balikpapan sempat terjadi, hal tersebut terjadi karena beberapa faktor yang menjadi penyebab seperti contohnya kekecewaan masyarakat akibat calon tunggal dan tidak adanya kader yang diusut dari partai politik. Selain itu ada juga faktor lain yang menjadi penyebab utama, Ketua KPU Kota Balikpapan Bapak Noor Thoha saat diwawancara mengungkapkan bahwa:

Kerusuhan yang berujung kekerasan tidak didapati, namun kegiatan demo pada pelaksanaan Pilkada 2020 di Kota Balikpapan terjadi karena adanya pengunjuk rasa yang merasa keberatan terkait panelis yang diajukan pada saat debat publik pasangan Rahmat-Thohari. Hal tersebut diungkapkan pendemo karena latar belakang panelis tidak dijelaskan dan berasal dari luar Kota Balikpapan

Pada saat Pilkada 2020 di Kota Balikpapan Kepala Bawaslu Kota Balikpapan mengungkapkan saat diwawancara oleh penulis pada tanggal 11 Januari 2022 di ruangnya yaitu:

“Kekecewaan masyarakat pada calon tunggal kepala daerah yang ada dalam Pilkada 2020 kemarin menyebabkan tingginya pelanggaran yang mereka buat. Didapati oknum memuat ajakan-ajakan agar tidak datang ke TPS dan tidak memberikan suara, terutama bagi pasangan calon tunggal.”

Menurut Rustam selaku masyarakat Kota Balikpapan yang sempat melihat aksi demonstrasi yang terjadi, mengatakan dalam wawancara bersama penulis yaitu:

“Masyarakat menganggap Pilkada 2020 gagal dalam mengutus paslon dan mencari kader pemimpin, sehingga ada indikasi kekecewaan yang ditunjukan oleh masyarakat dengan melaksanakan demo, apalagi di masa pandemi sekarang yang sulit. Masyarakat merasa membutuhkan pemimpin yang dapat

mengatasi masalah yang sedang terjadi yaitu penanganan Covid- 19.”

Faktor yang Mengakibatkan Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Balikpapan

Bersumber pada hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan, penulis dapat menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 di Kota Balikpapan, antara lain:

A. Faktor Politik

Kekecewaan masyarakat merupakan cermin dari gagalnya partai- partai politik dalam mencari dan mengusung calon-calon pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat di era modern seperti ini. Saat ini masyarakat sudah memiliki pemahaman yang cukup tinggi tentang politik dan membuat mereka sadar dan lebih berhati-hati dalam memilih calon-calon pemimpin mereka. Masyarakat yang sudah jenuh dengan situasi politik akhir-akhir ini berasumsi bahwa siapapun yang terpilih menjadi Kepala Daerah tidak akan memberikan dampak apapun bagi mereka.

Adanya kejadian calon tunggal dalam pelaksanaan Pilkada 2020 membuat masyarakat kehilangan alternatif dalam memilih Calon Walikota dan Wakil Walikota. Terlebih lagi, masyarakat merasa pasangan calon tunggal yang ada kurang menarik karena berlatar belakang pengusaha. Berdasarkan wawancara dengan Kepala KPU Kota Balikpapan yaitu Bapak Noor Thoha dalam hasil analisis penulis, masyarakat Kota Balikpapan kecewa dengan keterbatasan pilihan calon Kepala Daerah yang melawan kotak kosong sehingga memilih untuk tidak peduli dan bersikap apatis.

Masyarakat juga menilai Partai Politik saat ini tidak berkompeten dalam mencari calon Kepala Daerah dan hanya mementingkan urusan mereka pribadi dan tidak mendengarkan suara rakyat. Bahkan yang lebih parah ditemukan adanya ajakan kepada masyarakat Kota Balikpapan untuk tidak berpartisipasi

dalam pelaksanaan pemilihan dengan tidak datang ke TPS dan tidak memberi hak suara mereka kepada pasangan calon tunggal atau memberikan hak suara mereka kepada kotak kosong.

B. Faktor Pandemi

Pandemi Covid-19 merupakan sebuah faktor yang membuat rendahnya tingkat partisipasi masyarakat Kota Balikpapan dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Wabah Virus Corona yang membuat banyak masyarakat yang takut dalam beraktivitas diluar rumah karena tingginya angka kasus virus corona. Adanya aturan dan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah sebagai upaya mengatasi dan menghadapi Covid-19 yang terjadi. Pemberlakuan *Social Distancing* dan adanya protokol kesehatan yang wajib dipatuhi oleh masyarakat membuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik Pilkada 2020 kurang diminati. Tantangan yang sangat besar dihadapi oleh pemerintah, terlebih KPU dan Bawaslu Kota Balikpapan. Dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada 2020 akhirnya pihak KPU melakukan kegiatan pemilihan/pencoblosan yang dilaksanakan sesuai dengan standar protokol kesehatan yang berlaku, sesuai dengan aturan pemerintah guna mencegah penyebaran wabah Virus Covid-19. KPU dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar karena harus bisa tetap melaksanakan Pilkada 2020 meskipun dalam masa Pandemi Covid-19 ini. Hal ini membuat KPU harus lebih ekstra dalam mensukseskan kegiatan Pilkada tersebut, berbagai upaya dilakukan demi meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Dampak dari Pandemi Covid-19 ini membuat partisipasi politik masyarakat dalam memilih sangat kurang. Hal tersebut dibuktikan kurangnya partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada pelaksanaan pencoblosan. Masyarakat takut dan enggan untuk berinteraksi serta beraktivitas diluar rumah meskipun telah dilakukan upaya pemerintah dengan adanya protokol kesehatan dan *social distancing*.

C. Faktor Sosialisasi

Kehadiran fenomena Pandemi Covid-19 merupakan pertama kalinya terjadi, selain itu terdapat calon tunggal yang melawan kotak kosong pada Pilkada 2020. Pentingnya memaksimalkan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar informasi yang diberikan merata dan juga dapat dipahami dengan baik dan benar tentang adanya kotak kosong di lembar suara, dan juga proses pelaksanaan pencoblosan yang menerapkan *social distancing* serta protokol kesehatan. KPU Kota Balikpapan dan pemerintah Kota Balikpapan yang bertugas dan berwenang masih sangat kurang melakukan inovasi dalam kegiatan sosialisasi, padahal masyarakat sudah beranggapan bahwa sosialisasi sangat menjenuhkan dan selalu monoton pada setiap kegiatan pemilihan terutama sosialisasi dilakukan di masa Pandemi.

Media Sosial sebagai sarana dalam penyampaian dan sosialisasi bagi KPU tentunya sangatlah penting terutama dimasa pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan masyarakat untuk berinteraksi terutama melaksanakan kegiatan yang berkumpul. Antusiasme masyarakat yang rendah dalam kegiatan sosialisasi berdampak pada hasil akhir dalam Pilkada 2020 karena kurangnya informasi yang mereka dapati, dan pola pikir masyarakat yang semakin tidak peduli pada kegiatan pemilihan tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan penulis terkait tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 Kota Balikpapan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi politiknya cukup rendah. Hal tersebut terbukti dari hanya 59% (449.065 pemilih berbanding 266.536 yang memilih) masyarakat yang menggunakan hak pilihnya pada tahun 2020, dimana hal tersebut berada dibawah dari target KPU Kota Balikpapan yaitu 77,50%. Terlebih daripada itu, terjadi penurunan tingkat partisipasi ditengah masyarakat. Hal tersebut

dibuktikan dengan terjadinya penurunan sebanyak 1% pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Bahkan tidak hanya partisipasi pada saat proses pemberian suara, namun juga pada saat proses sosialisasi. Hal tersebut disampaikan oleh KPU Kota Balikpapan kepada penulis pada saat wawancara, telah terjadi sejak awal masa Pemilihan Umum di Kota Balikpapan dan terus berlanjut. Kota Balikpapan masih mengalami presentasi rendah dalam tingkat partisipasi politik. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada 2020 Kota Balikpapan adalah faktor politik, faktor pandemi dan faktor sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.38043/jid.s.v4i2.2496>
- Dunggio, S., & Yantu, I. N. (2021). Studi Kasus Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango Di Tengah Pandemi Covid 19 . *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.202>
- Istyawati, D. (2021). Peran Media Massa terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa pada Pemilihan Umum 2019 . *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 25(2). <https://doi.org/DOI:10.46426/jp2kp.v25i2.142>
- Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014) . *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 3(2).

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>
- Maso'oed, M., & MacAndrews, C. (2008). *Perbandingan Sistem Politik*. Gadjah Mada University Press.
- Noviawati, M., & Masjidah, D. (2020). Peran Tutor Dalam Meningkatkan Motivasi Jayagiri Lembang. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 3(2).
- Nurgiansah, T. H. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat Sleman Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Civic Hukum*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v6i1.14994>
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu sebagai upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *EJournal Ilmu-Komunikasi*, 4(1).
[https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/Jurnal%20\(12-18-15-12-11-44\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/Jurnal%20(12-18-15-12-11-44).pdf)
- Subekti, T. (2014). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*.
<https://www.neliti.com/publications/108550/partisipasi-politik-masyarakat-dalam-pemilihan-umum-studi-turn-of-voter-dalam-pe>
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2014). Perspektif Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Malang. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 3(1).
<https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/71>
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8407.g9060>



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license